

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Timur Tengah dengan populasi mencapai 17 juta jiwa penduduk.<sup>1</sup> Suriah juga dikenal sebagai salah satu negara penghasil gas alam dan minyak bumi yang besar di Timur Tengah. Menurut data dari *US Energy Information Administration*, Suriah mampu memproduksi minyak bumi sebesar 383 ribu barel per hari dan gas alam sebesar 316 juta kubik per hari dimana hal ini dapat menyumbang sekitar seperempat pendapatan pemerintah.<sup>2</sup> Namun keadaan ini menjadi terbalik ketika Perang Saudara Suriah terjadi. Perang saudara mengakibatkan penurunan produktivitas sumber daya energi tersebut secara tajam sehingga Suriah mengalami kekurangan pasokan.<sup>3</sup>

Konflik ini berawal dari unjuk rasa masyarakat terhadap Pemerintah Suriah di Kota Deraa. Unjuk rasa yang terjadi pada Maret 2011 ini merupakan bentuk protes masyarakat yang kontra terhadap pemerintah agar membebaskan tahanan politik.<sup>4</sup> Protes ini juga menginginkan agar Presiden Suriah yaitu Bashar Al-Assad

---

1. "The World Factbook: Syria", Central Intelligence Agency, diakses 22 September 2016, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>.

2. "Syria", U.S. Energy Information Administration, diakses 19 Agustus 2016, [https://www.eia.gov/beta/international/analysis\\_includes/countries\\_long/Syria/syria.pdf](https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Syria/syria.pdf).

3. *Ibid.*

4. "Syria Profile - Timeline", BBC News, diakses 14 Nopember 2016, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995>.

untuk turun dari jabatannya.<sup>5</sup> Kekacauan yang ditimbulkan dari unjuk rasa ini mendorong Pemerintah Suriah mengambil tindakan keras dengan menurunkan kekuatan militer untuk membubarkan unjuk rasa serta menangkap para pelakunya. Tindakan pemerintah ini tentu saja mendapat respon keras dari masyarakat yang kontra dengan pemerintah, sehingga perang saudara ini pun terjadi. Ketika konflik ini terjadi pada tahun 2011.

Perang saudara menjadi semakin besar dan meluas hingga merambah ke kota lain di Suriah yaitu Damascus dan Aleppo pada 2012.<sup>6</sup> Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut sangat besar. Selain menurunnya produktivitas sumber daya energi Suriah, sarana dan infrastruktur juga rusak parah akibat tembakan senjata api maupun ledakan bom. Dampak terparah dari konflik ini adalah jumlah korban jiwa yang sangat besar. Menurut data dari *Martyr Statistics*, jumlah korban jiwa akibat konflik ini dari tahun 2011 hingga 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Korban Jiwa Konflik Suriah Tahun 2011-2014<sup>7</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Korban Jiwa</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>2011</b>	6.054	4
<b>2012</b>	41.835	28
<b>2013</b>	44.243	29
<b>2014</b>	30.131	20

5. Lucy Rodgers, David Gritten, James Offer, dan Patrick Asare, "Syria: The Story of The Conflict", *BBC News*, 11 Maret 2016, diakses 19 Agustus 2016, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>.

6. *Ibid.*

7. "Martyr Counts By Year", Martyr Statistic, diakses 14 Nopember 2016, <http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=29>.

Keadaan ini akhirnya mendorong masyarakat untuk meninggalkan Suriah. Pilihan untuk menjadi pengungsi ini diambil oleh masyarakat demi keselamatan dan berusaha mencari perlindungan internasional. Menurut data yang ada hingga tahun 2014, pengungsi Suriah ini menyebar dan datang ke beberapa negara tetangga seperti Lebanon dimana jumlah pengungsinya mencapai 1.158.995 jiwa, Irak yang mencapai 233.625 jiwa, Mesir yang mencapai 138.212 jiwa, dan Turki yang mencapai 1.622.839 jiwa.<sup>8</sup> Berdasarkan data tersebut, Turki menjadi negara tujuan pengungsi Suriah yang terbesar. Hal ini sangat dimungkinkan karena secara geografis Turki berbatasan langsung dengan Suriah. Berdasarkan data dari *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, jumlah pengungsi Suriah yang datang ke Turki dari tahun 2011-2012 mencapai 8000 pengungsi, pada 2013 mencapai 162.912 pengungsi, dan pada 2014 mencapai 1.062.710 pengungsi.<sup>9</sup>

Turki melalui institusinya yaitu *Disaster and Emergency Management Authority (AFAD)* menampung pengungsi di *Temporary Protection Centers (TPCs)* yang tersebar di beberapa wilayah Turki seperti Hatay, Gaziantep, Sanliurfa, Kilis, Mardin, Kahramanmaras, Osmaniye, Adiyaman, Adana, dan Malatya.<sup>10</sup> Semenjak konflik di Suriah terjadi, Turki telah dan terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi yang datang. Turki juga melakukan

---

8. *Ibid.*

9. "Total Persons of Concern", Syria Regional Refugee Response, diakses 14 Nopember 2016, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224>.

10. "Current Status in AFAD Temporary Protection Centres", Disaster and Emergency Management Authority, diakses 22 September 2016, <https://www.afad.gov.tr/en/2602/Current-Status-in-AFAD-Temporary-Protection-Centres>.

koordinasi dan kerjasama dengan berbagai elemen dan aktor yang ada, baik lokal maupun internasional seperti organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang membantu dan menangani pengungsi Suriah di Turki adalah UNHCR. UNHCR merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 14 Desember 1950 dengan mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi secara global.<sup>11</sup>

Koordinasi dan kerjasama yang terjalin diantara keduanya didasari atas beberapa hal seperti Turki telah menjadi anggota UNHCR sejak berdiri pada 1950.<sup>12</sup> Sebagai anggota UNHCR, Turki terikat dalam sebuah prinsip yang disepakati bersama yaitu *Non-Refoulement* dimana tertera dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967.<sup>13</sup> Kemudian pada tahun 2014, Turki menerapkan *Open Border Policy* sehingga pengungsi yang datang bisa masuk dan tidak terikat waktu.<sup>14</sup> Penerapan kebijakan ini serta semakin parahnya konflik Suriah menyebabkan gelombang pengungsi tidak menunjukkan adanya penurunan dan semakin bertambah. Situasi dan kondisi ini mengakibatkan penumpukan jumlah pengungsi dan menimbulkan masalah baru yang dihadapi. Masalah-masalah ini seperti adanya perselisihan antara etnik pengungsi dengan etnik lokal di wilayah Hatay, munculnya masalah sosial dimana mulai maraknya prostitusi dan kriminalitas, hingga adanya indikasi praktek poligami serta pernikahan dini yang mana hal ini

---

11. UNHCR, *Convention and Protocol: Relating to Status of Refugees*, (Geneva: UNHCR Media Relations and Public Information Service, 2010), 2.

12. *Ibid.*, 6.

13. *Ibid.*, 30.

14. Souad Ahmadoun, "Turkey's Policy Toward Syrian Refugees", *SWP Comments* 47 (2014): 1.

ilegal di Turki.<sup>15</sup> Turki tidak hanya menjadi *host* bagi pengungsi Suriah, setidaknya sejak tahun 1920an, Turki telah menerima pengungsi dengan berbagai status seperti *assylum seeker*, *internally displaced people*, *stateless person*, *returnness*, dan imigran.<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa hal inilah yang mendorong UNHCR untuk membantu Turki dalam menangani pengungsi Suriah.

Pengungsi Suriah merupakan permasalahan kemanusiaan yang besar saat ini. Jumlah pengungsi Suriah di Turki pun terus bertambah, sehingga terjadi penumpukan jumlah pengungsi. Kondisi ini menimbulkan masalah-masalah lain seperti terbatasnya tempat tinggal, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, hingga masalah perselisihan etnik dan sosial. Maka dari itu, hal ini menjadi dasar dan fokus dalam penelitian untuk melihat peran UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2011-2014.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2011-2014.**

---

15. *Ibid.*, 3.

16. "Protecting Refugees", UNHCR, diakses 22 September 2016, <http://www.unhcr.org/about-us/background/509a836e9/protecting-refugees-role-unhcr.html>.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan internasional seperti menjelaskan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis bagi penulis yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hubungan internasional khususnya dalam kajian kemanusiaan dengan mengetahui peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi Suriah di Turki.

#### **1.4.2. Secara Empiris**

Serta secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya hubungan internasional dan bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1 Peringkat Analisis**

Peringkat analisis dalam sebuah penelitian, utamanya Ilmu Hubungan Internasional, bisa menjadi sangat penting karena digunakan untuk menjelaskan

maupun meramalkan perilaku-perilaku dalam hubungan internasional.<sup>17</sup> Sehingga, untuk dapat menelaah atau mengamati suatu fenomena dalam hubungan internasional harus menentukan terlebih dahulu unit eksplanasinya kemudian baru menekankan pada peringkat analisis yang akan digunakan.<sup>18</sup> John T. Rourke menjelaskan bahwa peringkat analisis dapat digunakan untuk melihat motivasi yang mendorong suatu aktor internasional berperilaku dan berfokus pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan luar negerinya di dalam hubungan internasional.<sup>19</sup>

Beberapa ahli menjelaskan beberapa peringkat analisis yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Mohtar Mas' oed menyebutkan terdapat lima peringkat analisis yaitu individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu wilayah, dan sistem global.<sup>20</sup> Rourke menyebutkan terdapat tiga peringkat analisis yang dapat digunakan yaitu individu, negara, dan sistem.<sup>21</sup> Sedangkan J. David Singer menyebutkan setidaknya terdapat dua peringkat analisis yang umum digunakan dalam penelitian yaitu negara dan sistem internasional.<sup>22</sup> Peringkat-peringkat analisis yang disebutkan dan dijelaskan oleh beberapa ahli ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh para aktor dalam membuat suatu kebijakan (domestik maupun luar negeri) atau mempengaruhi

---

17. Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1994), 35.

18. *Ibid.*

19. John T. Rourke, *International Politics on the World Stage*, Edisi ke-12 (New York: The McGraw-Hill Companies, 2009), 65.

20. Mohtar Mas' oed, *Op. Cit.*, 40.

21. John T. Rourke, *Loc. Cit.*

22. J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics* Vol. 14 No. 1 (1961): 78.

proses pembuatan kebijakan sehingga mencerminkan perilaku para aktor dalam hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan peringkat analisis yang ada, maka penelitian ini tidak menggunakan peringkat analisis karena penelitian ini tidak meneliti tentang pengaruh para aktor atas suatu kebijakan ataupun perilakunya melainkan hanya mendeskripsikan peran dari sebuah organisasi internasional.

## **1.5.2 Landasan Teoritik**

### **1.5.2.1 Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional sebagai aktor internasional tentunya memiliki peranan dalam sistem internasional. Organisasi internasional yang dibentuk dari sebuah perjanjian internasional maupun instrumen pokok lain, maka organisasi internasional ini memiliki kepribadian hukum di hukum internasional. Kepribadian hukum menjadi sangat penting bagi organisasi internasional karena dapat mendorong kinerja serta peranannya.<sup>23</sup> Sebagai contoh, sebuah organisasi internasional dapat menjalankan perannya dalam pembuatan traktat dan sebagai forum untuk praktek negara-negara.<sup>24</sup> Morse Hirsch menambahkan pula bahwa organisasi internasional dapat membentuk rezim internasional dengan memberikan regulasi serta mengontrol hubungan antarpemerintah maupun

---

23. Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 71.

24. *Ibid.*, 79.

memberikan aturan-aturan terkait isu yang ada,<sup>25</sup> seperti rezim non-proliferasi nuklir misalnya. Dalam konvensi internasional, organisasi internasional dapat berperan sebagai pihak yang memberikan informasi, pihak yang menyimpan dokumen ratifikasi (*deposiroty*), serta berperan aktif dalam pelaksanaan dan penerapan konvensi tersebut.<sup>26</sup>

Pendapat lain mengenai peran organisasi internasional dijelaskan oleh Clive Archer dimana Archer menyebutkan setidaknya terdapat tiga peran organisasi internasional, yaitu:

- a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional sebagai instrumen -lebih mengacu kepada *Intergovernmental Organization* (IGO). Hal ini dikarenakan anggota dari IGO merupakan negara. Sehingga, negara menggunakan IGO sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sesuai dengan politik luar negerinya.<sup>27</sup>
- b. Sebagai wadah. Berbeda dengan peran sebelumnya, organisasi internasional sebagai wadah digunakan oleh anggotanya untuk bersosialisasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan bertemu, berdiskusi, berdebat, hingga melakukan kerjasama terkait isu-isu yang muncul di sistem internasional.<sup>28</sup>
- c. Sebagai aktor independen. Layaknya negara, organisasi internasional dapat membuat sebuah keputusan serta bertindak tanpa dipengaruhi oleh faktor-

---

25. Morse Hirsch, *The Responsibility of International Organizations Toward Third Parties: Some Basic Principles*, (Dordrecht; Boston; London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), 4.

26. Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 2004), 81-82.

27. Clive Archer, *International Organizations*, Edisi ke-3, (London; New York: Routledge, 2001), 68-69.

28. *Ibid.*, 73.

faktor eksternal. Organisasi internasional juga memiliki posisi yang netral. Namun dalam beberapa kasus, terdapat organisasi internasional yang memiliki pengaruh lebih besar dari sebuah negara.<sup>29</sup>

Peran organisasi internasional dipahami melalui tujuan pembentukan organisasi internasional itu sendiri. Tujuan dari pembentukan organisasi internasional sendiri didasari pada suatu isu tertentu sehingga peran organisasi internasional berkaitan pada isu tersebut. Adapun beberapa peran organisasi internasional berdasarkan beberapa isu seperti demokrasi. Peran organisasi internasional dalam demokrasi adalah untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi di suatu negara.<sup>30</sup> Sebagai contoh, *African Union* (AU) merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan memperkuat demokrasi di Afrika dan Sahara.<sup>31</sup>

Peran organisasi internasional juga dapat dilihat dalam isu keamanan dan perdamaian. Peran organisasi internasional dalam hal ini sebagai *collective security system*.<sup>32</sup> *Collective security system* merupakan sebuah mekanisme keamanan yang mengharuskan para anggotanya untuk tidak menggunakan *power* (militer) sebagai alat untuk menyelesaikan sebuah persengketaan, jika terjadi pelanggaran maka organisasi internasional terkait bertanggung-jawab dalam

---

29. *Ibid.*, 79.

30. Thomas Kwasi Tiekou, "Multilateralization of Democracy Promotion and Defense in Africa", *Africa Today* Vol. 56 No. 2 (2009): 75.

31. *Ibid.*, 77.

32. Wolfram F. Hanrieder, "International Organizations and International Systems", *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 10 No. 3 (1966): 297.

penanganannya melalui mekanisme yang sudah disetujui secara kolektif.<sup>33</sup> Di awal pembentukan PBB, isu keamanan dan perdamaian menjadi fokus dalam sistem internasional, bahkan hingga saat ini. Peran ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam *Charter of The United Nations* pada *Article I* poin satu PBB yaitu:<sup>34</sup>

*“To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.”*

Seiring perkembangan zaman, isu keamanan mengalami pergeseran makna, sehingga menimbulkan kritik bagi organisasi internasional karena dianggap hanya berfokus kepentingan negara saja. Makna keamanan ini pun mulai memperhatikan dan fokus pada keamanan manusia (*human security*) atau dalam hal ini ialah isu kemanusiaan.<sup>35</sup> Isu kemanusiaan menjadi isu penting dalam banyak organisasi internasional yang ada sekarang ini. J. Samuel Barkin menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa peran penting dalam kaitannya dengan isu kemanusiaan. Salah satu peran organisasi internasional yaitu sebagai *human*

---

33. J. Samuel Barkin, *International Organization: Theories and Institutions*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006), 65.

34. “Charter of The United Nations”, UN, diakses 5 Oktober 2016, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/>.

35. Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations", *International Organization* Vol. 53 No. 4 (1999): 698, diakses 15 Oktober 2016, <http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=kpt07061&v=2.1&id=GALE%7CA57829894&it=r&asid=cefa3517a18d7abedffaf2fe35c810c6>.

*rights protector*.<sup>36</sup> Organisasi internasional yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap bahwa hal ini merupakan sesuatu yang esensial sehingga harus menjadi fokus bagi negara-negara di dunia maupun organisasi internasional. PBB sendiri telah menunjukkan kepeduliannya terhadap isu ini dengan dikeluarkannya *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 1948 juga dibentuknya *United Nations High Commissioner for Human Rights* (UNHCHR) pada 2005.<sup>37</sup> UNHCHR berdiri dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM yang ada secara global.

Peran lain organisasi internasional dalam isu kemanusiaan adalah sebagai *humanitarian assistance*.<sup>38</sup> Secara umum, peran organisasi internasional sebagai *humanitarian assistance* adalah memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada individu yang tidak memiliki tempat tinggal maupun akses untuk mendapatkan makanan yang disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi seperti bencana alam maupun perang. Untuk mendukung peranan ini, organisasi internasional juga memiliki peran lain yaitu dalam peningkatan *capacity building*.<sup>39</sup> Peran ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi internasional sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal.

UNHCR memiliki mandat yaitu memberikan perlindungan serta membantu para pengungsi secara global akibat dari adanya bencana alam, isu etnik, perbedaan ideologi, kekerasan, hingga perang seperti yang dialami Suriah saat

---

36. J. Samuel Barkin, *Op. Cit.*, 80.

37. *Ibid.*, 79-81.

38. *Ibid.*, 83-84.

39. Naim Kapucu dan Claudia Petrescu, "Capacity Building Through Service Learning", *Academic Exchange Quarterly* (2006): 132.

ini. Maka dari itu, sesuai dengan beberapa penjelasan peran organisasi internasional di atas, UNHCR memiliki peran sebagai *humanitarian assistance* dan *capacity building*. Peran UNHCR sebagai *humanitarian assistance* adalah dengan memberikan serta menyediakan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Sedangkan peran UNHCR dalam *capacity building* ialah sebagai bentuk peningkatan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UNHCR dalam membantu pengungsi sehingga menghasilkan solusi jangka panjang.

#### **1.5.2.2 Humanitarian Assistance**

Organisasi internasional yang bertindak sebagai donor memiliki beberapa peranan dalam isu kemanusiaan dan salah satunya ialah sebagai *humanitarian assistance*.<sup>40</sup> *Good Humanitarian Donorship* mendefinisikan *humanitarian assistance* sebagai berikut:<sup>41</sup>

*“Humanitarian assistance is generally accepted to mean the aid and action designed to save lives, alleviate suffering and maintain and protect human dignity during and in the aftermath of man-made crises and natural disasters, as well as to prevent and strengthen preparedness for the occurrence of such situations.”*

Untuk memahami definisi ini, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan aksi kemanusiaan itu sendiri. Setidaknya, menurut

---

40. Humanitarian Policy Group, *A History of the Humanitarian System: Western Origins and Foundations*, diedit oleh Eleanor Davey, John Borton, dan Matthew Foley, (London; UK: Overseas Development Institute, 2013), 1.

41. “Defining Humanitarian Assistance”, Global Humanitarian Assistance, diakses 5 September 2016, <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>.

*Humanitarian Policy Group*, terdapat empat periode waktu dalam perkembangan aksi kemanusiaan.<sup>42</sup>

Periode pertama, dimulai dari awal kemunculan aksi kemanusiaan itu sendiri hingga Perang Dunia I. Sejarah aksi kemanusiaan sendiri telah ada ratusan tahun lamanya, tepatnya ketika agama mulai bermunculan di dunia. Ajaran-ajaran agama yang ada di dunia, secara tidak langsung, telah menganjurkan pengikutnya untuk melakukan aksi kemanusiaan. Sebagai contoh dalam Islam, aksi kemanusiaan dapat ditemukan dalam ajaran agama ini yaitu melalui zakat, begitu pun dengan agama lainnya. Namun dalam sejarah modern, aksi kemanusiaan dimulai sejak abad ke-18 yang ditandai dengan berdirinya *International Committee of the Red Cross*.<sup>43</sup> Pada periode ini, aksi kemanusiaan diperuntukkan bagi korban akibat dari perang yang ada.

Periode kedua ialah pada saat Perang Dunia II. Aksi kemanusiaan mulai berkembang seiring berkembangnya permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Salah satunya ialah permasalahan pengungsi. PBB, pada masa ini menjadi organisasi internasional yang berfokus terhadap permasalahan pengungsi dengan membentuk *Nansen International Office for Refugees* dan mengembangkan hak-hak bagi pengungsi.<sup>44</sup> Pada periode ketiga, aksi kemanusiaan mulai berfokus pada permasalahan kemiskinan dan masuk pada diskursus pembangunan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh berbagai aktor terhadap korban maupun suatu negara yang mengalami permasalahan pelik seperti krisis pangan ternyata tidak

---

42. Humanitarian Policy Group, *Op. Cit.*, 5.

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*, 8.

memberikan hasil yang begitu baik. Pemberian bantuan langsung dirasa tidak cukup dan dibutuhkan kemandirian agar korban dapat mengolah kebutuhannya sendiri. Maka dari itu, konsep pembangunan mulai diterapkan sebagai solusi jangka panjang. Organisasi pangan internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) menerapkan *agricultural development* sebagai solusi jangka panjang.<sup>45</sup>

Periode terakhir merupakan periode dimana aksi kemanusiaan memiliki unsur politik didalamnya. *Open Border Policy* merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai bentuk aksi kemanusiaan. Ketika Uni Soviet mulai terbuka bagi dunia luar, Uni Soviet menerapkan kebijakan ini sehingga pekerja dari luar dapat masuk.<sup>46</sup> Kasus lain ialah ketika *Operation Lifeline Sudan* dibuat pada April 1989 sehingga donor dapat memberikan bantuan kemanusiaan yang sebelumnya telah melakukan perjanjian antara pemerintah dan *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A).<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan perkembangan aksi kemanusiaan dan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *humanitarian assistance* merupakan tindakan serta bantuan kemanusiaan yang diberikan dalam upaya menyelamatkan hidup dan meringankan penderitaan korban akibat dari sebuah krisis seperti perang, penyakit, kekerasan politik, ataupun bencana alam serta melakukan tindakan pencegahan sehingga dapat dipahami pula bahwa *humanitarian assistance* tidak

---

45. General Assembly Economic and Social Council, "Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations", *Report of the Secretary-General A/55/82-E/2000/61* (2000): 3.

46. Humanitarian Policy Group, *Op. Cit.*, 12.

47. *Ibid.*

hanya sekedar memberikan bantuan kemanusiaan sebagai solusi jangka pendek, namun juga berusaha memberikan solusi jangka panjang.

Solusi jangka pendek yang diberikan oleh organisasi internasional dapat pula disebut dengan *emergency relief* yang merupakan bantuan yang diberikan secara langsung dan cepat, sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana alam, krisis, atau pun konflik. *Emergency relief* meliputi bantuan berupa kebutuhan dasar manusia atau yang pada saat itu paling dibutuhkan.<sup>48</sup> Sedangkan pada solusi jangka panjang, organisasi internasional menggunakan konsep pembangunan sebagai strategi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dengan tujuan korban dapat lebih mandiri. Solusi ini dapat pula disebut sebagai *development assistance*.<sup>49</sup>

UNHCR yang memiliki mandat dalam membantu dan melindungi pengungsi secara global memiliki peran sebagai *humanitarian assistance*. Peran UNHCR ini pun terbagi ke dalam dua kategori solusi yaitu solusi jangka pendek atau disebut sebagai *emergency relief* dan solusi jangka panjang atau disebut sebagai (*development assistance*).

### **1.5.2.3 Capacity Building**

*Capacity building* atau dapat pula disebut sebagai *capacity development* merupakan istilah dalam diskursus pembangunan yang telah dikenal sejak akhir

---

48. Branden Little, "Band of Crusaders: American Humanitarians, the Great War, and the Remaking of the World", *Rockefeller Archive Center Research Reports Online* (2008): 2, diakses 20 Oktober 2016, <http://rockarch.org/publications/resrep/pdf/little.pdf>.

49. Alexander Betts, "International Cooperation and the Targeting of Development Assistance for Refugee Solution: Lessons from the 1980s", *Working Paper* No. 107 (2004): 2.

1980-an dan mulai berkembang pada tahun 1990-an.<sup>50</sup> Diskusi mengenai *capacity building* dimulai dari adanya pemikiran bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi dirasa belum cukup menjadi sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia, bahkan dalam beberapa kasus, terdapat negara-negara yang belum dapat mengatur dan mengelola sistemnya sehingga tidak dapat menghasilkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>51</sup> Maka dari itu, konsep ini digunakan untuk memberikan solusi walaupun dalam perjalanannya masih terdapat perdebatan.

*Capacity building* merupakan konsep baru dalam ranah pembangunan, namun meskipun demikian konsep ini memiliki peranan penting dalam pengembangan beberapa pemikiran seperti *institutions building*, *institutional development*, *human resource development*, *development management/administration*, *institutional strengthening*, *organizational development*, *community development*, *integrated rural development* dan *sustainable development*.<sup>52</sup> Stephen F. Jooster juga mengatakan bahwa *capacity building* mengacu pada peningkatan sektor publik sehingga memiliki kinerja yang lebih baik.<sup>53</sup> Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Grindle dalam

---

50. Réal Lavergne dan John Saxby, "Capacity Development: Vision and Implications", *Capacity Development Occasional Series* No. 3 (2001): 1.

51. Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, dan Mark Perstinger, "Capacity Development: Definitions, Issues and Implications for Planning, Monitoring and Evaluation", *Universalia Occasional Paper* No. 35 (1999): 1.

52. *Ibid.*, 2-3

53. Stephan F. Jooster, "A New Public Sector in Developing Countries", *Working Paper* No. 36 (2008): 2.

Jooster dimana *capacity building* merupakan peningkatan fungsi sehingga lebih efektif, lebih efisien, dan berkelanjutan.<sup>54</sup>

Grindle membagi *capacity building* menjadi tiga tingkat yaitu pertama pada tingkat individu dimana *capacity building* pada tingkat ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan individu sehingga bisa memiliki tanggung jawab yang baik.<sup>55</sup> Franks dalam Jooster menambahkan dimana kapasitas individu ini dapat ditingkatkan dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta sikap sehingga memiliki kecakapan dalam memenuhi tanggung jawabnya.<sup>56</sup> Tingkat kedua yaitu tingkat organisasi dimana peningkatannya ditujukan pada efektifitas struktur organisasi tersebut sehingga memiliki kinerja yang lebih baik.<sup>57</sup> Tingkat ketiga yaitu tingkat institusi dimana peningkatan kapasitasnya pada reformasi institusi itu sendiri sehingga memiliki lingkungan yang kondusif.<sup>58</sup> Ketiga tingkatan ini juga sesuai dengan tingkatan *capacity building* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dimana hal ini sebagai bentuk peningkatan dan penguatan peran maupun hubungan juga menyediakan program/kegiatan yang dapat memaksimalkan fungsi dari individu, organisasi, dan institusi itu sendiri.<sup>59</sup> Tarance Morrison menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan *capacity building* yang baik, maka harus ada proses yang dilalui yaitu

---

54. *Ibid.*, 15.

55. *Ibid.*, 16.

56. *Ibid.*

57. *Ibid.*, 16-17.

58. *Ibid.*, 17.

59. UNDP, *Capacity Development*, (New York: Management Development and Governance Division Bureau for Policy Development, 1997), 3.

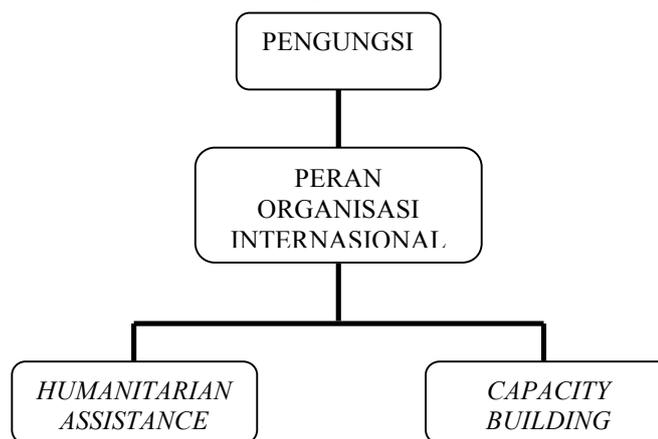
pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses untuk membangun kompetensi yang dibutuhkan dalam usaha beradaptasi pada adanya perubahan.<sup>60</sup>

Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa *capacity building* merupakan proses yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Capacity building* juga tidak diperuntukkan hanya pada satu tingkatan saja namun juga ke beberapa tingkatan lain, sehingga dapat mencapai peningkatan secara keseluruhan. UNHCR yang memiliki peran dalam *capacity building* berupaya memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah di Turki melalui program/kegiatan yang dirancang agar dapat meningkatkan serta memperkuat kapasitas kemampuan dari individu, organisasi, maupun institusi yang ada sehingga memiliki efisiensi dan efektifitas kinerja.

#### 1.5.2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan landasan teoritik yang telah dijelaskan di atas, maka konsep kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Bagan 1.1 Kerangka Pikir Penelitian**



60. Tarance Morrison, *Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, (Asian Development Bank Institute, 2001), 23-24.

Adanya isu kemanusiaan, seperti pengungsi, tidak hanya menjadi perhatian bagi negara saja tetapi juga bagi organisasi internasional. Hal inilah yang mendorong organisasi internasional dalam penanganan pengungsi secara global. Organisasi internasional memiliki peran dalam penanganan permasalahan pengungsi ini antara lain sebagai *humanitarian assistance* dan *capacity building*.

## **1.6 Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini ialah UNHCR mempunyai mandat dalam memberikan perlindungan dan penanganan pengungsi secara global. Maka dari itu, UNHCR berupaya membantu Pemerintah Turki dalam menangani pengungsi Suriah di Turki melalui perannya sebagai *humanitarian assistance* dengan memberikan *emergency relief* sebagai solusi jangka pendek dan *development assistance* sebagai solusi jangka panjang serta UNHCR juga berperan dalam *capacity building* dengan memberikan bantuan seperti advokasi, pelatihan, dan bantuan teknis.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

#### **1.7.1.1 *Emergency Relief***

*Emergency relief* menurut *Glossary of Humanitarian Terms* yaitu:<sup>61</sup>

---

61. "Glossary of Humanitarian Terms", ReliefWeb Project, diakses 20 Oktober 2016, [http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb\\_aug2008.pdf](http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf).

*“The immediate survival assistance to the victims of crisis and violent conflict. Most relief operations are initiated on short notice and have a short implementation period (project objectives are generally completed within a year). The main purpose of emergency relief is to save lives.”*

Menurut Australian Government of Departement of Social Services, *emergency relief* merupakan.<sup>62</sup>

*“Emergency relief services are delivered by community organisations and help people address immediate basic needs in times of crisis. Emergency relief can act as a safety net for people experiencing financial distress or hardship and who have limited means or resources to help them alleviate their financial crisis.”*

Menurut Human Services, definisi dari *emergency relief* adalah.<sup>63</sup>

*“Emergency relief is the provision of essential needs to persons affected by, or involved in the management of, an emergency.”*

Berdasarkan beberapa definisi dari *emergency relief* di atas, maka dapat dipahami bahwa *emergency relief* merupakan bantuan yang diberikan secara langsung dan segera, sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa maupun dampak lain yang diakibatkan oleh bencana alam, krisis, atau pun konflik. *Emergency relief* meliputi bantuan berupa kebutuhan dasar manusia atau yang pada saat itu paling dibutuhkan.<sup>64</sup> Bantuan-bantuan ini dapat berupa makanan, transportasi, finansial, pakaian, ketersediaan air, tempat tinggal sementara, dan sebagainya. Penyediaan bantuan kemanusiaan ini setiap organisasi internasional

---

62. “Emergency Relief”, Australian Government of Departement of Social Services, diakses 14 Nopember 2016, <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/communities-and-vulnerable-people/programs-services/emergency-relief>.

63. Departement of Human Services, *Emergency Relief Handbook*, (Melbourne: Health & Services Emergency Management, 2010), 3.

64. Branden Little, *Loc. Cit.*

memiliki *emergency relief* yang berbeda sesuai dengan mekanisme dan tujuan yang dimiliki organisasi tersebut.<sup>65</sup>

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional yang ada yaitu UNHCR menyediakan bantuan kemanusiaan yang sifatnya sebagai solusi jangka pendek (*emergency relief*) bagi pengungsi berupa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, akses terhadap makanan, ketersediaan air, hingga kesehatan.

#### **1.7.1.2 *Development Assistance***

Adanya ketergantungan atas bantuan kemanusiaan yang diberikan menyebabkan korban tidak dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan para donor juga memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan.<sup>66</sup> Hingga akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an, baik pemerintah dunia maupun aktor internasional lain, berupaya merumuskan sebuah solusi bantuan kemanusiaan yang tidak menyebabkan ketergantungan sehingga korban dapat mandiri. Maka dari itu, digunakanlah konsep pembangunan sebagai solusi jangka panjang yang dapat pula disebut sebagai *development assistance*.<sup>67</sup>

Jeff Crisp menggambarkan *development assistance* sebagai sebuah pendekatan yang berorientasikan pada pembangunan dari awal sehingga penerima bantuan dapat menuju swasembada dan berkelanjutan.<sup>68</sup> Menurut *German*

---

65. Rachel Scott, "Imagining More Effective Humanitarian Aid: A Donor Perspective", *OECD Development Co-Operation Working Paper* No.18 (2014): 7.

66. Jeff Crisp, "Mind the Gap! UNHCR, Humanitarian Assistance and the Development Process", *New Issues in Refugee Research Working Paper* No. 43 (2001): 2.

67. Alexander Betts, *Loc. Cit.*

68. Jeff Crisp, *Loc. Cit.*

*Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), development assistance* dijelaskan sebagai berikut:<sup>69</sup>

*“...designed to mitigate the impact of protracted or recurring crises, violent conflicts and disasters caused by natural events that undermine the prospects for social and economic development of large parts of the population and thus reinforce poverty.”*

Jika *development assistance* dimasukkan ke dalam ranah pengungsi, maka *development assistance* dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>70</sup>

*“A programming approach which aims to promote the inclusion of refugees and host communities in development agendas through additional development assistance to improve burden-sharing with countries hosting a large number of refugees and to promote a better quality of life and self-reliance for refugees pending durable solutions and an improved standard of living for refugee-hosting communities.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *development assistance* merupakan bantuan yang diberikan agar penerima dapat mandiri dan sebagai solusi jangka panjang. *Development assistance* dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa program/kegiatan. Program/kegiatan dapat berbeda-beda pada tiap donor yang ada karena bergantung pada isu yang ditangani.<sup>71</sup> Sebagai contoh, PBB menggunakan program/kegiatan seperti *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* untuk membantu dalam penyelesaian masalah terkait konflik

---

69. German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), “Strategy on Transitional Development Assistance Strengthening Resilience - Shaping Transition”, *BMZ Strategy Paper* No. 6 (2003): 10.

70. “Glossary of Humanitarian Terms”, ReliefWeb Project, diakses 14 Nopember 2016, [http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb\\_aug2008.pdf](http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf).

71. General Assembly Economic and Social Council, “Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations”, *Report of the Secretary-General* A/55/82–E/2000/61 (2000): 6.

tertentu.<sup>72</sup> *Food and Agriculture Organization* (FAO) menerapkan *agricultural development* sebagai program/kegiatan berkelanjutan dalam isu pangan.<sup>73</sup> Begitu pun untuk isu kemanusiaan seperti pengungsi, terdapat beberapa program/kegiatan yang diterapkan seperti *voluntary repatriation*, *local integration*, dan *resettlement*.<sup>74</sup>

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional yang ada yaitu dalam memberikan bantuan kemanusiaan, utamanya bagi pengungsi, UNHCR menerapkan beberapa program/kegiatan seperti *voluntary repatriation*, *local integration*, dan *resettlement* sebagai solusi jangka panjang (*development assistance*).

### **1.7.1.3 Capacity Building**

Istilah *capacity building* atau juga disebut *capacity development* telah dikenal sejak akhir 1980-an dan mulai berkembang pada tahun 1990-an. *Capacity building* merupakan bagian dari konsep pembangunan.<sup>75</sup> Definisi *capacity building* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu:<sup>76</sup>

*“Capacity development is the process by which individuals, organisations, institutions and societies develop abilities (individually and collectively) to perform functions, solve problems and set and achieve objectives.”*

---

72. Jacques Fomerand, Cecelia M. Lynch, dan Karen Mingst, “Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding”, *Encyclopedia Britannica*, 30 November 2015, diakses 3 Nopember 2016, <https://www.britannica.com/topic/United-Nations/Peacekeeping-peacemaking-and-peace-building>.

73. General Assembly Economic and Social Council, *Op. Cit.*, 3.

74. Alexander Betts, *Op. Cit.*, 3.

75. Réal Lavergne dan John Saxby, *Loc. Cit.*

76. UNDP, *Op. Cit.*, 3.

Sehingga dapat dipahami bahwa *capacity building* merupakan sebuah proses, memiliki beberapa aktor yaitu individu, organisasi, dan komunitas, serta *capacity building* dapat dikatakan sebagai usaha dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai suatu tujuan. *Capacity building* dapat dipahami pula melalui beberapa poin berikut<sup>77</sup>, pertama, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, *capacity building* haruslah dipelajari (*learned by doing*) dan hal ini membutuhkan waktu. Kedua, dibutuhkan adanya hubungan antara aktor dan sistem yang dapat merumuskan strategi dan program *capacity building* yang sesuai. Ketiga, untuk mencapai keberhasilan dalam *capacity building* maka diperlukan tujuan nyata, fokus, dan spesifik sebagai solusi jangka pendek serta adanya *sustainable development* sebagai solusi jangka panjang.

Pemahaman lebih lanjut juga dijelaskan oleh UNDP berupa metode peningkatan *capacity building* bagi individu, organisasi, dan komunitas.<sup>78</sup> Bagi individu, *capacity building* dapat diterapkan melalui kegiatan seperti pembelajaran, pelatihan, juga akses atas informasi sehingga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagi organisasi dengan fokus pada struktur organisasi, visi dan misi, kebijakan, kualitas SDM, hingga keuangan. Bagi komunitas dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat sehingga mencapai tujuan bersama.

Peran organisasi internasional dalam *capacity building* ialah sebagai donor yang membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi sehingga tujuan

---

77. Réal Lavergne dan John Saxby, *Op. Cit.*, 3-4.

78. UNDP, *Op. Cit.*, 3-5.

tercapai secara maksimal. Bantuan yang diberikan dapat melalui beberapa hal seperti advokasi/*lobbying*, *networking*, pelatihan, bantuan teknis, koordinasi, pemantauan (*monitoring*), evaluasi, dan sebagainya.<sup>79</sup> *Capacity building* juga dapat ditingkatkan dengan menciptakan lingkungan kondusif serta fokus pada isu spesifik sehingga mampu menyediakan kebijakan, *legal framework*, peluang, insentif, sumber daya, dan lainnya.<sup>80</sup>

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka definisi operasional yang ada yaitu dalam perannya pada *capacity building*, UNHCR menerapkan beberapa program/kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kemampuan individu, organisasi, maupun institusi seperti advokasi, pelatihan, dan bantuan teknis.

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan berbagai aspek dari sebuah fenomena dan tidak menjelaskan mengenai sebab akibat di antara dua variabel yang berbeda.<sup>81</sup> Tipe penelitian ini juga berusaha memperoleh dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting.<sup>82</sup> Dalam hal ini berupaya untuk menggambarkan peran UNHCR dalam menangani pengungsi Suriah ke Turki sepanjang tahun 2011-2014.

---

79. *Ibid.*, 12.

80. *Ibid.*, 17-18.

81. "Descriptive Research", Research Methodology, diakses 19 September 2016, <http://research-methodology.net/research-methodology/research-design/conclusive-research/descriptive-research/>.

82. Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 28.

### 1.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pemilihan tersebut dikarenakan pada tahun 2011 merupakan awal munculnya perang saudara yang diakibatkan dari unjuk rasa dengan tuntutan agar Presiden Bashar al-Assad turun dari jabatannya. Sedangkan tahun 2014 dipilih sebagai tahun dengan jumlah pengungsi Suriah ke Turki tertinggi yang mencapai 1.062.710 jiwa.<sup>83</sup> Penggunaan data-data di luar jangkauan penelitian dimungkinkan untuk sekedar pelengkap atau tambahan informasi.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif memiliki dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan suatu objek atau dokumen original yang biasa disebut dengan *first-hand information* yang dapat berupa hasil wawancara, kuisisioner, dokumen historis dan legal, data-data statistik, maupun objek-objek seni.<sup>84</sup> Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang tersedia.<sup>85</sup> Data sekunder ini dapat berupa data dari studi pustaka, situs, buku, majalah, artikel, serta koran.<sup>86</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

---

83. "Total Persons of Concern", Syria Regional Refugee Response, diakses 31 Oktober 2016, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224>.

84. Ulber Silalahi. *Op. Cit.*, 289.

85. *Ibid.*, 291.

86. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Pengertian Pakar, diakses 19 September 2016, <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html>.

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Ulber Silalahi menjelaskan bahwa analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data dari penyajian data dengan dikelompokkan dalam suatu bentuk yang dapat dengan mudah dibaca serta diinterpretasikan.<sup>87</sup> Teknik analisis data dapat dibagi menjadi dua yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah proses analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antarvariabel yang sedang diteliti.<sup>88</sup> Tujuan analisis ini supaya peneliti bisa mendapatkan pemahaman dari hubungan variabel-variabel sehingga bisa menjawab masalah yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini dengan mengolah serta menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan menjadi data yang terstruktur dan memiliki makna.<sup>89</sup>

### 1.7.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara garis besar melalui sistematika penulisan yang terbagi ke dalam empat bab yaitu:

Bab 1 Memaparkan hal-hal yang mendasari adanya penelitian ini, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian terdapat kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis dan landasan teoritik. Selanjutnya ada hipotesis dan metodologi

---

87. Ulber Silalahi. *Op. Cit.*, 332.

88. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Pengertian Pakar, diakses 19 September 2016, <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html>.

89. *Ibid.*

penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

- Bab 2 Merupakan pemaparan mengenai UNHCR serta perannya sebagai *humanitarian assistance* dalam membantu Turki menangani pengungsi Suriah.
- Bab 3 Merupakan pemaparan mengenai peran UNHCR dalam *capacity building* untuk membantu Turki menangani pengungsi Suriah.
- Bab 4 Merupakan penutup dan kesimpulan dari penelitian ini.